



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI  
SEKTOR KONTRUKSI  
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH  
JABATAN KERJA AHLI MUDA  
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**LAPORAN PERENCANAAN PEKERJAAN**

**KODE UNIT KOMPETENSI:  
F45.PW02.030.01**

**BUKU INFORMASI**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI  
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**  
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

## KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan bidang kerjanya. Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan Modul Pelatihan (Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi) untuk jabatan kerja **Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota** mengacu kepada SKKNI Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, yang dalam penjabarannya kepada program pelatihan tertuang pada Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK). Penyusunan KPBK dilakukan dengan mengidentifikasi Unit-unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang merupakan dasar rumusan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya memenuhi kompetensi standar seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga dimungkinkan adanya tambahan materi-materi lainnya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari standar yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja

Penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan diantaranya Focus Group Discussion serta Workshop yang melibatkan para nara sumber, praktisi, pemangku jabatan serta stakeholder. Dengan keterbatasan pelibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan modul ini, dan seiring dengan perkembangan dan dinamika teknologi konstruksi kedepan, maka tetap diupayakan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan sejalan dengan dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan modul ini dilapangan melalui respon peserta pelatihan, instruktur, asesor serta semua pihak.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan modul ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan ini.

Jakarta, Nopember 2012

PUSAT PEMBINAAN  
KOMPETENSI DAN PELATIHAN  
KONSTRUKSI

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	1
<b>BAB I PENGANTAR</b> .....	2
1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).....	2
1.2 Penjelasan Materi Pelatihan.....	2
1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini .....	3
1.4 Pengertian-pengertian / Istilah .....	4
<b>BAB II STANDAR KOMPETENSI</b> .....	6
2.1 Peta Paket Pelatihan .....	6
2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi .....	6
2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari .....	7
<b>BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN</b> .....	14
3.1 Strategi Pelatihan .....	14
3.2 Metode Pelatihan .....	15
3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan .....	15
<b>BAB IV LAPORAN PERENCANAAN PEKERJAAN</b> .....	35
4.1 Umum .....	35
4.2 Penyusunan Kerangka Laporan.....	35
4.3 Laporan Pendahuluan.....	37
4.4 Kompilasi Data.....	40
4.5 Penyusunan Analisis Data .....	42
4.6 Penyusunan Hasil Rencana .....	45
4.7 Penyusunan Album Peta.....	50
<b>BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI</b> .....	66
5.1 Sumber Daya Manusia .....	66
5.2 Sumber-sumber Perpustakaan .....	66
5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan .....	67

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENGANTAR**

#### **1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)**

##### **1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi.**

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

##### **1.1.2 Kompeten ditempat kerja.**

Jika seseorang kompeten dalam pekerjaan tertentu, maka yang bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **1.2 Penjelasan Materi Pelatihan**

##### **1.2.1 Desain materi pelatihan**

Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri.

- 1) Pelatihan klasikal adalah pelatihan yang disampaikan oleh seorang instruktur.
- 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur.

##### **1.2.2 Isi Materi pelatihan**

###### **1) Buku Informasi**

Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan.

###### **2) Buku Kerja**

Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri.

Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
- b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja.

### 3) Buku Penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan.
- b. Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan.
- d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja.
- e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek.
- f. Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

#### 1.2.3 Penerapan materi pelatihan

##### 1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah:

- a. Menyediakan Buku Informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.
- b. Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan.
- c. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.
- d. Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban / tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada Buku Kerja.

##### 2) Pada Pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah:

- a. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan.
- b. Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada Buku Kerja.
- c. Memberikan jawaban pada Buku Kerja.
- d. Mengisikan hasil tugas praktek pada Buku Kerja.
- e. Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur.

### 1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini

#### 1.3.1 Pengakuan Kompetensi Terkini (Recognition of Current Competency-RCC)

Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak akan dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan.

#### 1.3.2. Persyaratan

Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui:

- 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau
- 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau
- 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

#### **1.4 Pengertian-pengertian / Istilah**

##### **1.4.1 Profesi**

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

##### **1.4.2 Standarisasi**

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

##### **1.4.3 Penilaian / Uji Kompetensi**

Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan.

##### **1.4.4 Pelatihan**

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

##### **1.4.5 Kompetensi**

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan.

##### **1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

#### **1.4.7 Standar Kompetensi**

Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

#### **1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)**

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4.9 Sertifikat Kompetensi**

Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

#### **1.4.10 Sertifikasi Kompetensi**

Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI

#### 2.1 Peta Paket Pelatihan

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan - Kode Unit F45.PW02.030.01, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

- Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Penerapan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Persiapan Kebutuhan Data Perencanaan
- Survei Primer dan Sekunder
- Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Pemeriksaan Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Evaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
- Penyusunan Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- Kemampuan Teknik Komunikasi

#### 2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi

##### 2.2.1 Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

##### 2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah "Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di tempat kerja".

##### 2.2.3 Durasi / waktu pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang



berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

### 2.2.4 Kesempatan untuk menjadi kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

## 2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
- mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
- memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
- menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

### 2.3.1 Judul Unit

Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan

### 2.3.2 Kode Unit

F45.PW02.030.01

### 2.3.3 Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun laporan pekerjaan perencanaan

### 2.3.4 Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal SOP perusahaan, komunikasi dan struktur organisasi perusahaan.

### 2.3.5 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kerangka penyajian laporan	1.1 Sistematika penyajian laporan disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 1.2 Kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis, dan buku rencana disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 1.3 Tingkat kepentingan materi dalam laporan dirumuskan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Menyusun Laporan Pendahuluan	2.1 Kerangka penyajian buku laporan pendahuluan disusun berdasarkan kerangka acuan kerja. 2.2 Tanggapan terhadap kerangka acuan kerja diuraikan. 2.3 Metodologi dan rencana kerja diuraikan. 2.4 Buku laporan pendahuluan disusun.
3. Menyusun kompilasi data	3.1 Kerangka penyajian buku kompilasi data disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 3.2 Data dan informasi disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. 3.3 Buku kompilasi data disusun.
4. Menyusun hasil analisis	4.1 Kerangka penyajian buku analisis disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 4.2 Hasil analisis disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. 4.3 Buku analisis disusun.
5. Menyusun hasil rencana	5.1 Kerangka penyajian buku rencana disusun berdasarkan NSPK yang berlaku. 5.2 Hasil penyusunan rencana disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. 5.3 Buku rencana disusun. 5.4 Dokumentasi hasil pembuatan Laporan Perencanaan Parsial Tata Ruang Wilayah dan Kota dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan.
6. Menyusun album peta	6.1 Daftar kebutuhan peta dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6.2 Peta kondisi eksisting dan hasil rencana disusun sesuai dengan skala yang ditetapkan. 6.3 Buku album peta disusun.

### 2.3.6 Batasan Variabel

#### 1. Kontek Variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan membuat laporan perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 1.2 Unit ini berlaku untuk membuat laporan perencanaan, meliputi:
  - 1.2.1 Laporan Pendahuluan
  - 1.2.2 Buku Kompilasi Data
  - 1.2.3 Buku Analisis
  - 1.2.4 Buku Rencana
  - 1.2.5 Album Peta
- 1.3 Materi penyajian laporan perencanaan didasarkan pada NSPK yang berlaku,
- 1.4 Laporan pendahuluan berisikan tentang pemahaman tentang kerangka acuan yang diberikan. Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Pekerjaan juga berisi masukan untuk penyempurnaannya, metodologi pendekatan yang digunakan, produk akhir kegiatan, ruang lingkup, jadwal rencana kegiatan, serta tugas serta tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Laporan ini merupakan acuan dan pengendali kegiatan secara keseluruhan. Selain itu, dirumuskan informasi/data yang perlu diinventarisir guna menyusun rencana kegiatan selanjutnya
- 1.5 Buku Kompilasi data berisikan data-data yang diperoleh dalam kegiatan survei dan pengumpulan data, antara lain: kebijakan terkait, kondisi fisik, sosial dan ekonomi, penggunaan lahan, serta infrastruktur. Selain itu juga berisikan hasil wawancara dengan *stakeholder*, aspirasi masyarakat, serta hasil pengamatan lapangan
- 1.6 Buku Analisis, berisikan karakteristik wilayah, serta potensi dan permasalahan pengembangan. Selain itu juga ditampilkan kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan hingga akhir tahun perencanaan
- 1.7 Buku Rencana, berisikan hasil penyusunan konsepsi rencana dan hasil pemantapan terhadap penyusunan rencana tata ruang wilayah
- 1.8 Album Peta, merupakan kumpulan peta, dengan skala peta disesuaikan dengan peraturan dan NSPK yang berlaku. Buku Album peta, antara lain berisi:
  - 1.8.1 Peta Profil Wilayah, meliputi antara lain:

- 1.8.1.1 Peta orientasi
- 1.8.1.2 Peta batas administrasi
- 1.8.1.3 Peta guna lahan
- 1.8.1.4 Peta rawan bencana
- 1.8.1.5 Peta sebaran penduduk
- 1.8.2 Peta hasil perencanaan
  - 1.8.2.1 Peta struktur ruang
  - 1.8.2.2 Peta pola ruang
  - 1.8.2.3 Peta penetapan kawasan strategis

## 2. **Perlengkapan yang diperlukan**

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana, antara lain:

1. Media penyimpanan data (komputer)
2. Media pencetakan (*printer*)
3. Media akses data (internet)

## 3. **Tugas yang harus dilakukan**

- 3.1 Menyusun Buku Kompilasi Data
- 3.2 Menyusun Buku Analisis
- 3.3 Menyusun Buku Rencana
- 3.4 Menyusun Album Peta

## 4. **Peraturan-peraturan yang diperlukan**

- 4.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- 4.2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
- 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya

4.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Penataan Ruang

### 2.3.7 Panduan Penilaian

#### 1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang diperlukan sebelum menguasai unit serta unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Penguasaan unit kompetensi sebelumnya:

- 1.1.1 F45.PW01.001.01: Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 1.1.2 F45.PW01.002.01: Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- 1.1.3 F45.PW02.001.01: Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 1.1.4 F45.PW02.002.01: Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan
- 1.1.5 F45.PW02.007.01: Melakukan survei primer dan sekunder
- 1.1.6 F45.PW02.010.01: Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 1.1.7 F45.PW02.011.01: Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 1.1.8 F45.PW02.012.01: Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 1.1.9 F45.PW02.018.01: Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
- 1.1.10 F45.PW02.021.01: Menyusun Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

1.2 Kaitan dengan unit lain

- 1.2.1 F45.PW03.001.01: Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- 1.2.2 F45.PW03.002.01: Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

2. **Kondisi Pengujian**

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar empat kerja secarasimulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji antara lain:

1. Ujian tertulis
2. Ujian lisan

3. **Pengetahuan yang dibutuhkan**

- 3.1 Pemahaman NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 3.2 Pemahaman peraturan perundangan bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota

4. **Keterampilan yang dibutuhkan**

- 4.1 Membuat outline laporan sesuai dengan peraturan perundangan NSPK perencanaan wilayah
- 4.2 Melakukan koordinasi dengan tim kerja dalam penyusunan laporan
- 4.3 Menampilkan hasil pekerjaan dalam Buku Laporan Perencanaan

5. **Aspek Kritis**

- 5.1. Kemampuan untuk mempelajari NSPK perencanaan wilayah
- 5.2. Kemampuan untuk menerapkan peraturan yang berlaku

### 2.3.8 Kompetensi kunci

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

### BAB III

## STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

### 3.1 Strategi Pelatihan

Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar dengan Instruktur dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

#### 3.1.1 Persiapan / perencanaan

- 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti.
- 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
- 3) Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.
- 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan.

#### 3.1.2 Permulaan dari proses pembelajaran

- 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar.
- 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

#### 3.1.3 Pengamatan terhadap tugas praktek

- 1) Mengamati keterampilan praktek yang didemonstrasikan oleh instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan.

#### 3.1.4 Implementasi

- 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman.
- 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek.
- 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.

#### 3.1.5 Penilaian

Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar peserta pelatihan



### 3.2 Metode Pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

#### 3.2.1 Belajar secara mandiri

Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasi kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

#### 3.2.2 Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

#### 3.2.3 Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

### 3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan

Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan materi pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (*session plan*) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur.

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:

Unit Kompetensi		Membuat Laporan Perencanaan Pekerjaan				
Elemen Kompetensi 1		Menyusun kerangka penyajian laporan				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
1.1	Sistematika penyajian laporan disusun berdasarkan NSPK yang berlaku 1) Dapat menjelaskan standar sistematika penyajian laporan sesuai dengan NSPK yang berlaku	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun sistematika penyajian laporan berdasarkan NSPK yang berlaku	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menjelaskan standar sistematika penyajian laporan sesuai dengan NSPK yang berlaku 2) Menyebutkan NSPK yang dijadikan	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>2) Dapat menyebutkan NSPK yang dijadikan acuan dalam penyusunan kerangka penyajian laporan</p> <p>3) Harus Mampu menyajikan sistematika laporan yang runut dan mudah dimengerti</p>			<p>acuan dalam penyusunan kerangka penyajian laporan</p> <p>3) Menyajikan sistematika laporan yang runut dan mudah dimengerti</p>	<p>Penataan Ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya</p>	
1.2	<p>Kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis, dan buku rencana disusun berdasarkan NSPK yang berlaku</p> <p>1) Dapat memaparkan perbedaan kerangka penyajian laporan untuk masing-masing buku kompilasi data, buku analisis dan buku rencana</p> <p>2) Mampu-menyusun</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun Kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis, dan buku rencana berdasarkan NSPK yang berlaku</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Memaparkan perbedaan kerangka penyajian laporan untuk masing-masing buku kompilasi data, buku analisis dan buku rencana</p> <p>2) Menyusun sistematika kerangka</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000</p>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>sistematika kerangka buku analisis</p> <p>3) Mampu menunjukkan penerapan NSPK yang berlaku pada kerangka penyajian laporan</p> <p>4) Harus mampu menyusun kerangka penyajian untuk tiga buku yang berbeda sebagai bagian dari laporan secara teliti</p>			<p>buku analisis</p> <p>3) Menunjukkan penerapan NSPK yang berlaku pada kerangka penyajian laporan</p> <p>4) Menyusun kerangka penyajian untuk tiga buku yang berbeda sebagai bagian dari laporan secara teliti</p>	<p>Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya</p>	
1.3	<p>Tingkat kepentingan materi dalam laporan dirumuskan</p> <p>1) Dapat merumuskan dengan tepat berdasarkan prioritas penyajian materi dalam laporan</p> <p>2) Mampu menunjukkan kesesuaian antara penetapan tingkat kepentingan materi dengan peraturan yang berlaku</p> <p>3) Harus mampu memberikan rumusan mengenai prioritas kepentingan materi secara</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat merumuskan tingkat kepentingan materi dalam laporan</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Merumuskan dengan tepat berdasarkan prioritas penyajian materi dalam laporan</p> <p>2) Menunjukkan kesesuaian antara penetapan tingkat kepentingan materi dengan peraturan yang berlaku</p> <p>3) Memberikan rumusan mengenai</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</p> <p>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang</p>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	cermat			prioritas kepentingan materi secara cermat	4) Wilayah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	

Unit Kompetensi		Membuat Laporan Perencanaan Pekerjaan				
Elemen Kompetensi 2		Menyusun Laporan Pendahuluan				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
2.1	Kerangka penyajian buku laporan pendahuluan disusun berdasarkan kerangka acuan kerja 1) Mampu menyusun kerangka penyajian buku laporan pendahuluan secara teliti 2) Dapat menjelaskan secara tepat isi buku laporan pendahuluan 3) Dapat menunjukkan kesesuaian kerangka	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun kerangka penyajian buku laporan pendahuluan disusun berdasarkan kerangka acuan kerja	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menyusun kerangka penyajian buku laporan pendahuluan secara teliti 2) Menjelaskan secara tepat isi buku laporan pendahuluan 3) Menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku	6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	penyajian buku laporan pendahuluan dengan kerangka acuan kerja			laporan pendahuluan dengan kerangka acuan kerja	Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	
2.2	Tanggapan terhadap kerangka acuan kerja diuraikan 1) Dapat memberikan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja 2) Harus-Mampu menguraikan tanggapan kerangka acuan kerja 3) Mampu menuliskan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja secara cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menguraikan Tanggapan terhadap kerangka acuan kerja	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Memberikan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja 2) Menguraikan tanggapan kerangka acuan kerja 3) Menuliskan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja secara cermat	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 4) Peraturan	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					5) Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	
2.3	<p>Metodologi dan rencana kerja diuraikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat merumuskan metodologi dan rencana kerja sebagai bagian dari laporan pendahuluan</li> <li>2) Mampu-menyusun uraian mengenai metodologi dan rencana kerja</li> <li>3) Harus mampu menguraikan metodologi dan rencana kerja secara cermat</li> </ol>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menguraikan metodologi dan rencana kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> <li>3. Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merumuskan metodologi dan rencana kerja sebagai bagian dari laporan pendahuluan</li> <li>2) Menyusun uraian mengenai metodologi dan rencana kerja</li> <li>3) Menguraikan metodologi dan rencana kerja secara cermat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan</li> </ol>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					5) Penataan Ruang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	
2.4.	Buku laporan pendahuluan disusun 1) Dapat menyusun buku laporan pendahuluan secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti 2) Mampu menerangkan secara ringkas isi buku laporan pendahuluan yang disusun 3) Harus mampu menyusun buku laporan pendahuluan secara runut, teliti dan informatif	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun buku laporan pendahuluan	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menyusun buku laporan pendahuluan secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti 2) Menerangkan secara ringkas isi buku laporan pendahuluan yang disusun 3) Menyusun buku laporan pendahuluan secara runut, teliti dan informatif	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	

Unit Kompetensi		Membuat Laporan Perencanaan Pekerjaan				
Elemen Kompetensi 3		Menyusun kompilasi data				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
3.1	Kerangka penyajian buku kompilasi data disusun berdasarkan NSPK yang berlaku 1) Dapat memberikan penjelasan mengenai kerangka penyajian buku kompilasi data 2) Dapat menyebutkan peraturan perundangan/ kebijakan yang terkait dengan penyusunan buku kompilasi data 3) Mampu menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku kompilasi data dengan NSPK yang berlaku 4) Harus mampu menyusun kerangka penyajian buku kompilasi data secara teliti	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun Kerangka penyajian buku kompilasi data berdasarkan NSPK yang berlaku	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Memberikan penjelasan mengenai kerangka penyajian buku kompilasi data 2) Menyebutkan peraturan perundangan/ kebijakan yang terkait dengan penyusunan buku kompilasi data 3) Menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku kompilasi data dengan NSPK yang berlaku 4) Menyusun kerangka penyajian buku kompilasi	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	10 menit



No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
				data secara teliti	5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	
3.2	Data dan informasi disusun sesuai dengan format yang ditetapkan 1) Dapat membuat ringkasan mengenai data dan informasi terkait dengan pekerjaan 2) Dapat menjelaskan secara singkat yang dimaksud dengan buku kompilasi data dan hubungannya dengan laporan pendahuluan 3) Mampu-menyusun data dan informasi sesuai dengan format dan kerangka penyajian buku kompilasi yang sudah ditetapkan 4) Harus mampu menyusun kompilasi data dan informasi secara cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun data dan informasi sesuai dengan format yang ditetapkan	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Membuat ringkasan mengenai data dan informasi terkait dengan pekerjaan 2) Menjelaskan secara singkat yang dimaksud dengan buku kompilasi data dan hubungannya dengan laporan pendahuluan 3) Menyusun data dan informasi sesuai dengan format dan kerangka penyajian buku kompilasi yang sudah ditetapkan 4) Menyusun kompilasi data dan informasi secara cermat	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	
3.3	<p>Buku kompilasi data disusun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat menjelaskan isi buku data kompilasi yang disusun</li> <li>2) Mampu-membuat outline buku laporan pendahuluan secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti</li> <li>3) Harus mampu menyusun buku laporan pendahuluan secara teliti</li> </ol>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun buku kompilasi data</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> <li>3. Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjelaskan isi buku data kompilasi yang disusun</li> <li>2) Membuat outline buku laporan pendahuluan secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti</li> <li>3) Menyusun buku laporan pendahuluan secara teliti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan</li> </ol>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	

Unit Kompetensi		Membuat Laporan Perencanaan Pekerjaan				
Elemen Kompetensi 4		Menyusun hasil analisis				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
4.1	<p>Kerangka penyajian buku analisis disusun berdasarkan NSPK yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat menyusun kerangka penyajian buku analisis</li> <li>2) Mampu menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku analisis dengan NSPK yang berlaku</li> <li>3) Harus mampu menyusun kerangka penyajian buku analisis secara teliti</li> </ol>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun kerangka penyajian buku analisis disusun berdasarkan NSPK yang berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> <li>3. Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun kerangka penyajian buku analisis</li> <li>2) Menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku analisis dengan NSPK yang berlaku</li> <li>3) Menyusun kerangka penyajian buku analisis secara teliti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang</li> </ol>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya</p>	
4.2	<p>Hasil analisis disusun sesuai dengan format yang ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat memberikan ringkasan mengenai hasil analisis terkait dengan pekerjaan</li> <li>2) Mampu-u menyusun hasil analisis sesuai dengan format dan kerangka penyajian yang sudah ditetapkan</li> <li>3) Harus mampu menyusun hasil analisis dalam buku laporan secara cermat</li> </ol>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun hasil analisis sesuai dengan format yang ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> <li>3. Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan ringkasan mengenai hasil analisis terkait dengan pekerjaan</li> <li>2) Menyusun hasil analisis sesuai dengan format dan kerangka penyajian yang sudah ditetapkan</li> <li>3) Menyusun hasil analisis dalam buku laporan secara cermat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan</li> </ol>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	
4.3	Buku analisis disusun 1) Dapat menerangkan isi buku analisis yang disusun 2) Mampu menyusun buku analisis secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti 3) Harus mampu menyusun buku analisis secara teliti	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun buku analisis	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menerangkan isi buku analisis yang disusun 2) Mampu menyusun buku analisis secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti 3) Menyusun buku analisis secara teliti	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	

Unit Kompetensi		Membuat Laporan Perencanaan Pekerjaan				
Elemen Kompetensi 5		Menyusun hasil rencana				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
5.1	<p>Kerangka penyajian buku rencana disusun berdasarkan NSPK yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat menjelaskan kerangka penyajian buku rencana</li> <li>2) Dapat menyebutkan NSPK yang terkait dengan penyajian buku rencana</li> <li>3) Mampu menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku rencana dengan NSPK yang berlaku</li> <li>4) Harus mampu menyusun kerangka penyajian buku rencana secara teliti</li> </ol>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun kerangka penyajian buku rencana berdasarkan NSPK yang berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> <li>3. Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjelaskan kerangka penyajian buku rencana</li> <li>2) Menyebutkan NSPK yang terkait penyajian buku rencana</li> <li>3) Menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku rencana dengan NSPK yang berlaku</li> <li>4) Menyusun kerangka penyajian buku rencana secara teliti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah</li> </ol>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					<p>tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya</p>	
5.2	<p>Hasil penyusunan rencana disusun sesuai dengan format yang ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat membuat ringkasan hasil penyusunan rencana sesuai format yang ditetapkan</li> <li>2) Mampu menjelaskan hasil rencana sesuai dengan format dan kerangka penyajian hasil rencana yang sudah ditetapkan</li> <li>3) Harus mampu menyusun hasil rencana sesuai format yang ditetapkan secara cermat</li> </ol>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun hasil penyusunan rencana sesuai dengan format yang ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> <li>3. Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat ringkasan hasil penyusunan rencana sesuai format yang ditetapkan</li> <li>2) Menjelaskan hasil rencana sesuai dengan format dan kerangka penyajian hasil rencana yang sudah ditetapkan</li> <li>3) Menyusun hasil rencana sesuai format yang ditetapkan secara cermat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana</li> </ol>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
					Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	
5.3	Buku rencana disusun 1) Dapat menjelaskan isi buku rencana yang disusun 2) Mampu-menyusun buku rencana secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti 3) Harus mampu menyusun buku rencana secara teliti	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun buku rencana	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menjelaskan isi buku rencana yang disusun 2) Menyusun buku rencana secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti 3) Menyusun buku rencana secara teliti	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana	10 menit



No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
5.4.	<p>Dokumentasi hasil pembuatan Laporan Perencanaan Parsial Tata Ruang Wilayah dan Kota dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat menjelaskan format dan prosedur yang digunakan untuk dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan parsial tata ruang wilayah dan kota</li> <li>2) Mampu menjelaskan keterkaitan format dan prosedur tersebut dengan NSPK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>3) Mampu menunjukkan pembuatan dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan</li> <li>4) Dapat membuat dokumentasi laporan dan pemilihan format serta prosedurnya secara cermat</li> </ol>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat membuat dokumentasi hasil pembuatan Laporan Perencanaan Parsial Tata Ruang Wilayah dan Kota dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> <li>3. Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjelaskan format dan prosedur yang digunakan untuk dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan parsial tata ruang wilayah dan kota</li> <li>2) Mampu menjelaskan keterkaitan format dan prosedur tersebut dengan NSPK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>3) Menunjukkan pembuatan dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan</li> <li>4) Membuat dokumentasi laporan dan pemilihan format serta prosedurnya secara cermat</li> </ol>	<p>Rincinya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya</li> </ol>	

Unit Kompetensi		Membuat Laporan Perencanaan Pekerjaan				
Elemen Kompetensi 6		Menyusun album peta				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
6.1	<p>Daftar kebutuhan peta dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat menjelaskan sistematika kerangka penyajian album peta</li> <li>2) Dapat menjelaskan muatan peta</li> <li>3) Mampu menunjukkan kesesuaian peta dengan NSPK yang berlaku</li> </ol>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat membuat daftar kebutuhan peta sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> <li>3. Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjelaskan sistematika kerangka penyajian album peta</li> <li>2) Menjelaskan muatan peta</li> <li>3) Menunjukkan kesesuaian peta dengan NSPK yang berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya</li> </ol>	10 menit
6.2	<p>Peta kondisi eksisting dan hasil rencana disusun sesuai dengan</p>	<p>Pada akhir pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Demonstrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjelaskan secara ringkas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 18</li> </ol>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	skala yang ditetapkan 1) Dapat menjelaskan secara ringkas perbedaan peta <i>existing</i> dan peta hasil rencana 2) Dapat mengidentifikasi NSPK yang terkait dengan penyajian peta-peta 3) Mampu-membuat peta-peta sesuai dengan format dan kerangka penyajian yang sudah ditetapkan 4) Mampu membuat peta-peta sesuai dengan skala yang ditetapkan secara cermat	sesi ini, peserta dapat menyusun peta kondisi eksisting dan hasil rencana sesuai dengan skala yang ditetapkan	3. Tugas	perbedaan peta <i>existing</i> dan peta hasil rencana 2) Mengidentifikasi NSPK yang terkait dengan penyajian peta-peta 3) Membuat peta-peta sesuai dengan format dan kerangka penyajian yang sudah ditetapkan 4) Membuat peta-peta sesuai dengan skala yang ditetapkan secara cermat	Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	
3.3	Buku album peta disusun 1) Dapat menerangkan isi buku album peta yang disusun 2) Mampu-menyusun album peta secara komprehensif,	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun buku album peta	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menerangkan isi buku album peta yang disusun 2) Menyusun album peta secara komprehensif	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2) Undang-undang	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	3) menarik dan mudah dimengerti Harus mampu menjelaskan susunan album peta beserta muatannya secara teliti			3) if, menarik dan mudah dimengerti Menjelaskan susunan album peta beserta muatannya secara teliti	3) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya	

## BAB IV

### LAPORAN PERENCANAAN PEKERJAAN

#### 4.1. Umum

Modul ini meliputi penyusunan kerangka laporan, laporan pendahuluan, kompilasi data, penyusunan analisis data, penyusunan hasil rencana dan penyusunan album peta.

#### 4.2. Penyusunan Kerangka Laporan

##### 4.2.1. Penyusunan sistematika penyajian laporan berdasarkan NSPK yang berlaku

- a. Penjelasan standar sistematika penyajian laporan sesuai dengan NSPK yang berlaku

Pada dasarnya, standar sistematika penyajian laporan sesuai dengan NSPK yang berlaku. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Bab VIII menyebutkan bahwa sistematika RTRW diuraikan dalam bentuk buku dengan sistematika sebagai berikut :

Buku I : Laporan Pendahuluan

Buku II : Kompilasi Data

Buku III : Analisa Data

Buku IV : Rencana

- b. Uraian NSPK yang dijadikan acuan dalam penyusunan kerangka penyajian laporan

NSPK yang dijadikan acuan dalam penyusunan kerangka penyajian laporan, yaitu :

- Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
- Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

- c. Penyajian sistematika laporan yang runut dan mudah dimengerti

Prosedur cara menyajikan sistematika laporan harus dilakukan dengan runut dan juga mudah dimengerti.

##### 4.2.2. Penyusunan kerangka penyajian laporan untuk buku kompilasi data, buku analisis, dan buku rencana berdasarkan NSPK yang berlaku

- a. Pemaparan perbedaan kerangka penyajian laporan untuk masing-masing buku kompilasi data, buku analisis dan buku rencana

Cara menguraikan perbedaan penyajian kerangka laporan untuk masing-masing buku kompilasi data, buku analisis dan buku rencana yaitu dengan menggambarkan isi dari ketiga buku tersebut. Cara mudah untuk mengetahui perbedaan kerangka tersebut, dapat diidentifikasi dari susunan daftar isi.

b. Penyusunan sistematika kerangka buku analisis

Cara menguraikan prosedur untuk menyusun sistematika kerangka buku analisis yaitu berpedoman dengan tujuan dari buku tersebut. Buku analisis bertujuan sebagai landasan perumusan kebijakan perencanaan, maka dalam penyusunan kerangka pun harus jelas agar tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

c. Petunjuk penerapan NSPK yang berlaku pada kerangka penyajian laporan

Dalam menguraikan prosedur cara untuk menyusun kerangka penyajian laporan, maka harus berdasarkan NSPK yang berlaku. Semisal, dalam NSPK kerangka penulisan laporan harus terdiri dari tiga bagian, yaitu Pendahuluan, Isi, dan Penutup, maka kerangka penulisan harus mengacu pada hal tersebut.

d. Penyusunan kerangka penyajian untuk tiga buku yang berbeda sebagai bagian dari laporan secara teliti

Dalam poin ini, hal penting saat menguraikan cara menyusun kerangka penyajian untuk tiga buku yang berbeda sebagai bagian dari laporan adalah ketelitian dan kecermatan penyusun.

4.2.3. **Perumusan tingkat kepentingan materi dalam laporan**

a. Perumusan yang tepat berdasarkan prioritas penyajian materi dalam laporan

Dalam menguraikan suatu prioritas penyajian materi dalam laporan, maka hal terpenting yaitu merumuskan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada.

b. Penjelasan kesesuaian antara penetapan tingkat kepentingan materi dengan peraturan yang berlaku

Dalam menguraikan prosedur cara untuk menerapkan tingkat kepentingan suatu materi, maka hal yang sangat penting adalah berpedoman dengan peraturan yang berlaku.

c. Penjelasan rumusan mengenai prioritas kepentingan materi secara cermat

Seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, dalam merumuskan prioritas kepentingan suatu materi dapat dijabarkan dan diurutkan berdasarkan kebutuhan yang paling dibutuhkan. Dalam poin ini, hal yang paling penting adalah bagaimana rumusan tersebut dianalisis dengan teliti dan cermat.

4.3. **Laporan Pendahuluan**

4.3.1. **Penyusunan kerangka penyajian buku laporan pendahuluan berdasarkan kerangka acuan kerja**

a. Penyusunan kerangka penyajian buku laporan pendahuluan secara teliti

Buku Laporan Pendahuluan, pada pokoknya berisikan tafsiran rinci yang disusun pihak Pelaksana Pekerjaan (umumnya konsultan) terhadap TOR (Term of Reference) yang dikeluarkan pihak Pemberi Pekerjaan (umumnya Bappeda atau Dinas Teknis terkait). Dalam kasus pekerjaan penyusunan rencana tata ruang kecamatan, maka pihak pemberi pekerjaan adalah Bappeda Kabupaten (umumnya di setiap daerah menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang).

Penyusunan kerangka penyajian buku laporan pendahuluan berisi :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Tinjauan Kebijakan
- Bab III Gambaran Umum
- Bab IV Wilayah Perencanaan

b. Penjelasan secara tepat isi buku laporan pendahuluan

Buku laporan pendahuluan adalah buku yang berisi tentang pemahaman perencana akan wilayah perencanaan, baik lingkup internal maupun eksternal. Laporan Pendahuluan memuat seluruh metode pendekatan, tujuan dan sasaran kegiatan, metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana survai yang akan dilakukan.

Adapun Substansi yang harus ada dalam Laporan Pendahuluan adalah :

- Rencana Kerja;
- Metodologi pekerjaan;
- Jadwal penugasan tenaga ahli;
- Isu permasalahan wilayah;
- Konsep Peta;
- Konsep analisis;
- Rumusan kajian literatur;
- Outline Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten;

c. Uraian kesesuaian kerangka penyajian buku laporan pendahuluan dengan kerangka acuan kerja

Dalam menguraikan cara menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku laporan pendahuluan dengan kerangka acuan kerja maka hal terpenting yaitu melakukannya dengan teliti dan cermat.

4.3.2. **Uraian tanggapan terhadap kerangka acuan kerja**

a. Pemberian tanggapan terhadap kerangka acuan kerja

Dalam menguraikan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja, maka hal poin-poin penting pada dasarnya mencakup:

- a. Tanggapan terhadap latar belakang
- b. Tanggapan terhadap maksud dan tujuan
- c. Tanggapan terhadap indikator keluaran
- d. Tanggapan terhadap cara pelaksanaan kegiatan
- e. Tanggapan terhadap pemahaman terhadap pekerjaan

b. Uraian tanggapan KAK

Dalam menguraikan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hal-hal di atas. Contoh kasus, ada sebuah pekerjaan terkait pengelolaan bencana banjir yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Maka tanggapan terhadap latar belakang pekerjaan, kira-kira meliputi isu banjir di suatu wilayah, telaah kebijakan yang telah ada, telaah instansi yang ada, serta pengelolaan banjir yang telah ada dan akan datang.

c. Penulisan tanggapan terhadap KAK

Dalam mengurai tanggapan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah menganalisisnya dengan teliti dan cermat.

4.3.3. **Uraian metodologi dan rencana kerja**

a. Perumusan metodologi dan rencana kerja sebagai bagian dari laporan pendahuluan

Cara menguraikan untuk perumusan metodologi dan rencana kerja sebagai bagian dari laporan pendahuluan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
2. Tahap Pengumpulan Data
3. Tahap Kajian/ analisis
4. Tahap Perumusan konsep rencana
5. Tahap Perumusan Rencana Tata Ruang
6. Tahap Perumusan Program Pembangunan

b. Penyusunan uraian mengenai metodologi dan rencana kerja

Dalam menguraikan prosedur cara menyusun suatu uraian mengenai metodologi dan rencana kerja, maka hal-hal berikut yang setidaknya harus tercakup:

- § Pendekatan Pekerjaan
- § Metodologi Pekerjaan
- § Tahapan kegiatan
- § Lokasi Kegiatan
- § Pengumpulan Data
- § Pengolahan Data

c. Uraian metodologi dan rencana kerja secara cermat

Seperti diungkapkan pada poin sebelumnya, maka poin penting dalam menguraikan metodologi dan rencana kerja yaitu melakukannya dengan teliti dan cermat.



#### 4.3.4. **Penyusunan buku laporan pendahuluan**

- a. Penyusunan buku laporan pendahuluan secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti

Dalam membuat Laporan pendahuluan setidaknya mencakup tiga hal berikut:

- Pendahuluan
- Tinjauan kebijakan
- Gambaran umum wilayah studi

Selain mengacu pada ketiga poin tersebut, dalam membuat laporan pendahuluan harus disusun dengan komprehensif, menarik, dan mudah dimengerti.

- b. Penjelasan secara ringkas isi buku laporan pendahuluan yang disusun  
Prosedur cara menerangkan secara ringkas terkait isi buku laporan pendahuluan yang disusun telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Dalam hal ini, sedapat mungkin para peserta dapat mencontohkan dengan baik ketiga hal diatas membuat (Pendahuluan, Tinjauan kebijakan, dan gambaran umum wilayah studi) dengan informatif.
- c. Penyusunan buku laporan pendahuluan secara runtut, teliti dan informatif  
Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, pada poin ini dalam menyusun buku laporan pendahuluan harus dilakukan secara runtut, teliti dan informatif.

#### 4.4. **Kompilasi Data**

##### 4.4.1. **Penyusunan kerangka penyajian buku kompilasi data berdasarkan NSPK yang berlaku**

Kompilasi data (fakta) merupakan sekumpulan data yang menjabarkan fakta-fakta dari suatu objek perencanaan yang diolah menjadi bentuk informasi potensi dan permasalahan, yang keduanya merupakan input untuk tahap perencanaan selanjutnya, yakni tahap analisis.

Berdasarkan buku kompilasi data revisi RTRW Kabupaten Temanggung, kerangka penyajian buku kompilasi data terdiri atas :

1. Bab I Pendahuluan  
Berisi tentang pengertian, maksud dan tujuan penyusunan kompilasi data, ruang lingkup dan metodologi.
2. Bab II Kebijaksanaan Pembangunan Daerah dan Sektoral  
Berisi tentang kebijaksanaan dan pendekatan daerah.
3. Bab III Kedudukan dan Peran Kabupaten dalam Regional
4. Bab IV Kondisi Eksisting  
Berisi tentang data dan informasi yang diperlukan untuk tahap perencanaan selanjutnya.

##### 4.4.2. **Penyusunan data dan informasi berdasarkan format yang ditetapkan**

- a. Memberikan penjelasan mengenai kerangka penyajian buku kompilasi data

Kerangka penyajian buku kompilasi data terdiri dari data dan informasi yang diperlukan, yaitu data dan informasi dari semua aspek perencanaan, baik aspek fisik dan lingkungan, sosial, kependudukan, ekonomi, sarana umum dan utilitas kota.

- b. Penyebutan peraturan perundangan/ kebijakan yang terkait dengan penyusunan buku kompilasi data  
Penyusunan buku kompilasi data tercantum dalam PerMen PU 17/PRT/M/2009.
- c. Mampu menunjukkan kesesuaian kerangka penyajian buku kompilasi data dengan NSPK yang berlaku  
Dalam menguraikan kerangka penyajian buku kompilasi data, maka yang perlu diperhatikan adalah menganalisis NSPK yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kerangka yang telah dibuat tercantum fakta wilayah berdasarkan kondisi fisik geografis (geologi, iklim, kelerengan, dan sebagainya), maka hal ini sudah sesuai dengan NSPK yang berlaku.
- d. Penyusunan kerangka penyajian buku kompilasi data secara teliti  
Seperti pada poin sebelumnya, tahapan untuk menyusun kerangka buku kompilasi harus mengacu pada NSPK yang berlaku. Poin penting dalam menyusun kerangka penyajian buku kompilasi data yaitu harus dilakukan secara cermat dan teliti.

#### 4.4.3. **Penyusunan data dan Informasi berdasarkan format yang ditetapkan**

- a. Pembuatan ringkasan mengenai data dan informasi terkait dengan pekerjaan  
Dalam pembuatan ringkasan mengenai data dan informasi terkait dengan pekerjaan, data dan informasi yang perlu ada adalah data dan informasi untuk semua aspek perencanaan, yaitu fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, ekonomi, sarana umum, dan utilitas kota.
- b. Penjelasan secara singkat yang dimaksud dengan buku kompilasi data dan hubungannya dengan laporan pendahuluan  
Buku kompilasi data (fakta) merupakan buku yang berisi sekumpulan data yang menjabarkan fakta-fakta dari suatu objek perencanaan yang diolah menjadi bentuk informasi potensi dan permasalahan, yang keduanya merupakan input untuk tahap perencanaan selanjutnya, yakni tahap analisis. Pekerjaan kompilasi data merupakan tahap proses seleksi data dan pengelompokan data sesuai dengan kebutuhan. Buku kompilasi merupakan hasil dari laporan pendahuluan dimana data yang didapat dari buku kompilasi data merupakan hasil dari pelaksanaan pekerjaan laporan pendahuluan, yaitu pengumpulan data.
- c. Penyusunan data dan informasi sesuai dengan format dan kerangka penyajian buku kompilasi yang sudah ditetapkan

Prosedur cara menyusun data dan informasi sesuai dengan format dan kerangka penyajian buku kompilasi yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Aspek Sumber Daya Alam
- Aspek Sumber Daya Manusia
- Aspek Sumber Daya Buatan
- Kebijakan-kebijakan daerah, regional dan nasional
- Perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu
- Faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal dan eksternal

d. Penyusun kompilasi data dan informasi secara cermat

Dalam menyusun kompilasi data dan informasi harus dilakukan secara cermat.

4.4.4. Penyusunan buku kompilasi data

a. Penjelasan isi buku kompilasi data yang disusun

Isi buku kompilasi data yang disusun telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

b. Pembuatan outline buku kompilasi data secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti

Dalam membuat buku kompilasi data hal terpenting yaitu dilakukan secara komprehensif, menarik, dan mudah dimengerti. Diharapkan peserta mampu membuat outline yang informatif.

c. Penyusunan buku kompilasi data secara teliti

Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, penyusunan buku kompilasi Dalam menyusun buku kompilasi data harus dilakukan secara teliti.

4.5. **Penyusunan Analisis Data**

4.5.1. Penyusunan kerangka penyajian buku analisis berdasarkan NSPK yang berlaku

a. Penjelasan kerangka penyajian buku analisis

Kerangka penyajian buku analisis disusun berdasarkan buku kompilasi data yang telah dibuat. Kerangka buku analisis terdiri atas Pendahuluan, tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan, data dan analisis serta analisis strategi penataan ruang.

b. Keterkaitan kesesuaian kerangka penyajian buku analisis dengan NSPK yang berlaku

Prosedur cara menyusun kesesuaian kerangka penyajian buku analisis dengan NSPK yang berlaku mengacu dari tindak lanjut dari buku kompilasi data dan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi untuk tahap perencanaan tata ruang selanjutnya.

c. Penyusunan kerangka penyajian buku analisis secara teliti

Dalam menyusun kerangka penyajian buku analisis harus dilakukan secara teliti.

4.5.2. **Penyusunan hasil analisis sesuai dengan format yang ditetapkan**

a. Penjelasan ringkasan mengenai hasil analisis terkait dengan pekerjaan

Kerangka penyajian buku analisis data terdiri atas :

- Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang, isu strategis, tujuan, sasaran dan hasil yang ingin dicapai serta metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Bab II Tinjauan berisi tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan, seperti : peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan penataan ruang serta kebijakan sektor lainnya.
- Bab III Data dan Analisis memberikan analisa tentang kondisi eksisting dan juga analisa wilayah yang meliputi kondisi fisik; ekosistem; biota/spesies; daerah rawan bencana; pencemaran lingkungan; daerah konservasi/perlindungan; ekonomi; sosial dan budaya; pertahanan dan keamanan; potensi pulau-pulau kecil; perikanan; dan alur pelayaran dan transportasi.
- Bab IV Analisis Strategi Penataan Ruang menjelaskan analisis strategi penataan ruang wilayah.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam penyusunan RTRW Kota. Pertama, analisis untuk menggambarkan karakteristik tata ruang wilayah kota. Kedua analisis potensi dan masalah pengembangan kota.

Karakteristik tata ruang wilayah kota yang harus digambarkan, meliputi :

- 1) kedudukan dan peran kota dalam wilayah yang lebih luas (regional)
  - kedudukan dan peran kota dalam sistem perkotaan nasional;
  - kedudukan dan peran kota dalam rencana tata ruang kawasan metropolitan (bila masuk dalam kawasan metropolitan);
  - kedudukan dan peran kota dalam rencana struktur ruang provinsi;
  - kedudukan dan peran kota dalam sistem perekonomian regional.
- 2) karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
  - karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);
  - potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi);
  - potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan
  - kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan sebagainya).
- 3) karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:

- sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun);
  - proporsi penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan
  - kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja.
- 4) karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
- basis ekonomi wilayah, ekonomi lokal, dan sektor informal;
  - prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang; dan
  - prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.
- 5) kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:
- sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan
  - pembangunan; dan
  - prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah kota kemudian dilakukan analisis potensi dan masalah pengembangan kota yang meliputi :

1. analisis daya dukung wilayah kota serta optimasi pemanfaatan ruang;
2. analisis daya tampung wilayah kota;
3. analisis pusat-pusat pelayanan;
4. analisis kebutuhan ruang; dan
5. analisis pembiayaan pembangunan

Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi :

1. Visi pengembangan wilayah;
2. Potensi dan masalah penataan ruang wilayah dari multi aspek yang berpengaruh;
3. Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah dari multi aspek yang berpengaruh;
4. Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan wilayah;
5. Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem perkotaan dan system prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
6. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah;

- b. Penyusunan hasil analisis sesuai dengan format dan kerangka penyajian yang sudah ditetapkan

Prosedur cara menyusun hasil analisis sesuai dengan format dan kerangka penyajian yang sudah ditetapkan telah dijelaskan pada poin sebelumnya., yaitu :

1. Visi pengembangan wilayah;
2. Potensi dan masalah penataan ruang wilayah dari multi aspek yang berpengaruh;
3. Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah dari multi aspek yang berpengaruh;
4. Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan wilayah;
5. Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem perkotaan dan system prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
6. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah;

c. Penyusunan hasil analisis dalam buku laporan secara cermat

Dalam menyusun hasil analisis dalam buku laporan harus dilakukan secara cermat.

#### 4.5.3. **Penyusunan buku analisis**

a. Penjelasan isi buku analisis yang disusun

Isi buku analisis yang disusun telah dijelaskan pada poin 4.5.2 (a)

b. Penyusunan buku analisis secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti

Prosedur cara menyusun buku analisis telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Sebagai contoh penyusunan buku analisa, yaitu buku analisa “Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Tsunami.

c. Penyusunan buku analisis secara teliti

Dalam menyusun buku analisis harus dilakukan secara teliti.

#### 4.6. **Penyusunan Hasil Rencana**

##### 4.6.1. **Penyusunan kerangka penyajian buku rencana berdasarkan NSPK yang berlaku**

a. Dapat menjelaskan kerangka penyajian buku rencana

Buku rencana merupakan buku akhir suatu proses gabungan antara kompilasi data dengan analisa data yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan

pemanfaatan, ketentuan pengendalian dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

- b. Dapat menyebutkan NSPK yang terkait dengan penyajian buku rencana Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sistematika penyajian buku rencana RTRW Provinsi adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1. Dasar hukum penyusunan RTRW provinsi
2. Profil wilayah provinsi
3. Isu-isu strategis
4. Peta-peta

II. Tujuan, Kebijakan dan Strategi

1. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi
2. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi

III. Rencana Struktur Ruang

1. Rencana system perkotaan wilayah provinsi
2. Rencana system jaringan prasarana wilayah provinsi

IV..... R  
encana Pola Ruang

1. Rencana pola ruang kawasan lindung
2. Rencana pola ruang kawasan budidaya

V. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

1. Lokasi dan jenis kawasan strategis provinsi
2. Peta kawasan strategis provinsi yang menunjukkan delineasu kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis nasional yang ada di wilayah provinsi

VI..... A  
arahan Pemanfaatan Ruang

1. Indikasi program perwujudan rencana struktur wilayah provinsi
2. Indikasi program perwujudan pola ruang wilayah provinsi

VII. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Indikasi arahan peraturan zonasi
2. Arahan Perizinan
3. Arahan insentif-disentif
4. Arahan penganan sanksi administrative

- c. Petunjuk tentang kesesuaian kerangka penyajian buku rencana dengan NSPK yang berlaku

Prosedur cara membuat kesesuaian kerangka penyajian buku rencana dengan NSPK yang berlaku telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Sebagai contoh Buku Rencana Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Tsunami Tahun 2007.

d. Penyusunan kerangka penyajian buku rencana secara teliti

Dalam menyusun kerangka penyajian buku rencana harus dilakukan secara teliti.

4.6.2. **Penyusunan hasil penyusunan rencana sesuai dengan format yang ditetapkan**

- a. Pembuatan ringkasan hasil penyusunan rencana sesuai format yang ditetapkan
- Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi  
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi (penataan provinsi) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.
  - Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi  
Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.
  - Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi  
Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
  - Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi  
Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.
  - Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi  
Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).
  - Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi  
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- b. Penjelasan hasil rencana sesuai dengan format dan kerangka penyajian hasil rencana yang sudah ditetapkan



Prosedur cara menyusun hasil rencana sesuai dengan format dan kerangka penyajian hasil rencana yang sudah ditetapkan dan dijelaskan pada poin sebelumnya.

- c. Penyusunan hasil rencana sesuai format yang ditetapkan secara cermat  
Dalam menyusun hasil rencana sesuai format yang ditetapkan dilakukan secara cermat.

#### 4.6.3. Penyusunan buku rencana

- a. Penjelasan isi buku rencana yang disusun
  - Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi  
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi (penataan provinsi) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.
  - Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi  
Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.
  - Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi  
Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
  - Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi  
Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.
  - Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi  
Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).
  - Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi  
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah provinsi.

- b. Penyusunan buku rencana secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti

Dalam menguraikan suatu buku rencana hal yang menjadi poin penting lainnya yaitu dapat disampaikan dengan cara komprehensif, menarik, dan mudah dimengerti. Peserta diharapkan mampu untuk membuat buku rencana yang informatif.

- c. Penyusunan buku rencana secara teliti

Seerti pada poin sebelumnya, dalam menguraikan buku rencana secara detail, maka yang harus dilakukan adalah menuliskan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja teliti dan cermat. Hal ini yang akan dijadikan acuan selanjutnya untuk buku rencana.

4.6.4. **Pembuatan dokumentasi hasil pembuatan Laporan Perencanaan Parsial Tata Ruang Wilayah dan Kota menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan**

- a. Penjelasan format dan prosedur yang digunakan untuk dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan parsial tata ruang wilayah dan kota

Format dan prosedur yang digunakan untuk dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan parsial tata ruang wilayah dan kota adalah dokumen cetak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009, buku rencana disajikan dalam format A4, yang dibuat sebanyak ketentuan dalam KAK. Sedangkan album peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 disajikan dalam format A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

- b. Penjelasan keterkaitan format dan prosedur tersebut dengan NSPK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Keterkaitan format dan prosedur dengan NSPK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Acuan format adalah kerangka acuan kerja. KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. KAK/TOR memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian dan biaya yang diperlukan.

Dalam Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, kerangka acuan kerja disusun dalam rangka persiapan penyusunan RDTR dengan memberikan pesan kuat terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan ruang, yaitu :

- a. Perumusan Arahan Pengembangan Kawasan

- Perumusan arahan pengembangan kawasan diarahkan agar menjaga keserasian dan keterpaduan antara rencana RTRW dengan RDTR;
- Menjaga keserasian dan keterpaduan antara kegiatan sektoral;

- Pengembangan kawasan diarahkan untuk pengendalian dan perlindungan ruang kawasan dan bangunan yang mempunyai nilai historis atau sejarah, perlindungan setempat, dll;
- Pengembangan kawasan diarahkan pula untuk memenuhi standar baku mutu lingkungan kawasan perencanaan;
- Pengembangan kawasan diarahkan untuk mendorong secara aktif peran masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pembangunan ruang.

b. Perumusan Pengelolaan Pembangunan Kawasan

- Membuat sumber dan pembiayaan kegiatan;
- Mobilisasi sumber daya manusia; dengan membentuk tim penasehat/pengarah, tim teknis, tim supervisi sesuai kebutuhan daerah;
- Menyiapkan kelengkapan administrasi dan kontrak;
- Menyiapkan program kerja yang lebih rinci, sebagai arahan bagi pelaksana untuk menyusun rencana.

c. Penjelasan tentang pembuatan dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan

Prosedur cara menunjukkan pembuatan dokumentasi hasil pembuatan laporan perencanaan, yaitu dengan mencetak laporan perencanaan yang telah dibuat.

d. Pembuatan dokumentasi laporan dan pemilihan format serta prosedurnya secara cermat

Pembuatan dokumentasi laporan dan pemilihan format serta prosedurnya dilakukan secara cermat.

#### 4.7. Penyusunan Album Peta

##### 4.7.1. Membuat daftar kebutuhan peta sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Penjelasan sistematika kerangka penyajian album peta

Album peta menyajikan segala macam informasi keruangan yang bisa dituangkan dalam bentuk peta. Album peta memuat peta tematik dari tahap kompilasi data, analisis hingga penyusunan rencana. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota, peta yang digunakan pada tahap kompilasi data dan analisis memuat peta-peta yang berisi profil tata ruang wilayah kota; sedangkan peta hasil rencana memuat peta rencana tata ruang wilayah kota.

b. Penjelasan muatan peta

Elemen-elemen esensial yang harus dimuat dalam suatu peta adalah judul peta, skala peta, symbol peta, orientasi peta, warna peta, grid, legenda, inset peta, serta sumber dan tahun terbit.

- Judul peta merupakan identitas dari sebuah peta yang menunjukkan wilayah yang tergambar pada peta.
- Skala peta adalah rasio (perbandingan jarak) antara jarak dip eta dan jarak sebenarnya.
- Simbol adalah suatu gambar pengganti dari gambar sebenarnya di permukaan bumi yang dipindahkan ke dalam peta.
- Orientasi peta (petunjuk arah) adalah tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, atau barat dari daerah yang digambarkan.
- Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi
- Grid terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu wilayah dipermukaan bumi.
- Legenda merupakan kamus dari bahasa peta yang digunakan untuk mempermudah mengetahui isi peta. Legenda berisi keterangan yang berupa symbol-simbol pada peta agar mudah dimengerti oleh pembaca.
- Inset adalah peta kecil tamahan yang memberikan informasi gambaran suatu wilayah yang tidak tergambar dalam peta.
- Sumber adalah lembaga atau badan yang menerbitkan sebuah peta, sedangkan tahun terbit adalah tahun dimana peta itu diterbitkan. Sumber dan tahun pembuatan peta dicantumkan untuk kebenaran peta yang dibuat.

c. Hubungan kesesuaian peta dengan NSPK yang berlaku

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah, kesesuaian peta disusun berdasarkan pada skala minimal yang diperlukan untuk merekonstruksi informasi pada peta di permukaan bumi. Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah, yaitu :

- Peta wilayah daerah propinsi berpedoman pada tingkat ketelitian minimal berskala 1:250.000.
- Peta wilayah daerah kabupaten berpedoman pada tingkat ketelitian minimal berskala 1:100.000.
- Peta wilayah daerah kota berpedoman pada tingkat ketelitian minimal berskala 1:50.000.

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota, prosedur cara menyusun kesesuaian peta wilayah daerah kota adalah sebagai berikut :

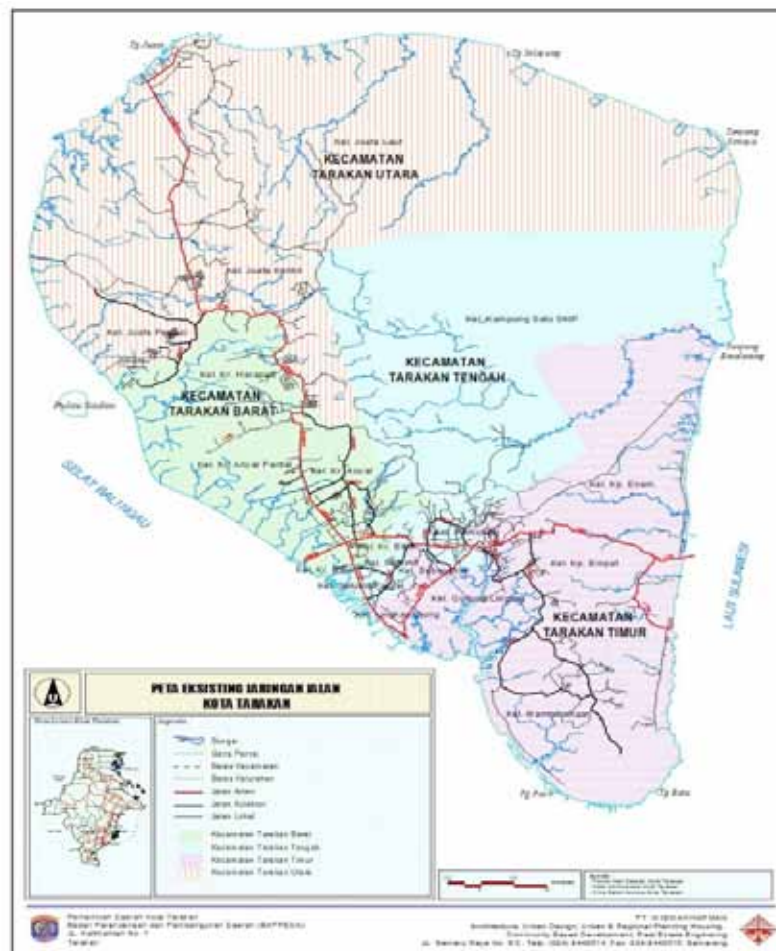
No	Nama Peta	Muatan Peta
<b>A. Peta Profil Tata Ruang Wilayah Kota</b>		
1.	Peta Orientasi	Peta skala kecil disesuaikan dengan ukuran kertas yang menunjukkan kedudukan geografis kota di dalam wilayah yang lebih luas.
2.	Peta Batas Administrasi	Delineasi kecamatan yang ada di dalam wilayah kota; a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Setiap kabupaten dan kota diberi warna berbeda; dan c. Setiap delineasi kecamatan diberi nama kecamatan bersangkutan. Setiap delineasi kecamatan diberi titik pusat kecamatan.
3.	Peta Guna Lahan	Berisi delineasi jenis guna lahan yang ada di seluruh wilayah kota; a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Klasifikasi pemanfaatan ruangnya bebas sesuai dengan apa yang ada di kenyataan (tidak harus mengikuti klasifikasi untuk Rencana Pola Ruang).
4.	Peta Rawan Bencana	Berisi delineasi kawasan-kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya; a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dalam gradasi warna.
5.	Penetapan Sebaran Penduduk	Berisi pola kepadatan penduduk per desa/kelurahan di seluruh kota untuk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk; a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Klasifikasi kepadatan penduduk disesuaikan dengan kondisi data, sekurangnya 3 interval dan sebanyak-banyaknya 5 interval; dan c. Gradasi kepadatan penduduk (interval) digambarkan dalam gradasi warna yang simultan.
6.	Peta-peta profil tata ruang lainnya yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam album peta.	
<b>B. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota</b>		
1.	Peta Rencana Struktur Ruang	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Kandungan peta meliputi: 1) Sistem pemukiman (PKW, PKL, PPK, dan PPL); 2) Sistem jaringan jalan (kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3, dan lokal primer); 3) Sistem jaringan kereta api (jumum); 4) Bandar udara dan pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan 5) Nama-nama PKW, PKL, PPK, PPL, bandara dan pelabuhan, dan sebagainya.
2.	Peta Rencana Jaringan Prasarana	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Kandungan peta meliputi: 1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi; 2) Rencana sistem jaringan energi; 3) Rencana sistem jaringan sumberdaya air; 4) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
3.	Peta Rencana Pola Ruang	a. Skala peta 1:20.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh dalam 1 lembar kertas, peta disajikan beberapa lembar. Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka bujur dan lintang geografis yang beraturan, seperti halnya pada peta rupa bumi; b. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta yang disajikan di dalam wilayah kota secara keseluruhan; c. Kandungan peta meliputi: 1) Delineasi rencana peruntukan pemanfaatan ruang dengan panduan; 2) Sungai, jaringan kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3, dan lokal primer; 3) Rel KA; dan 4) Nama-nama tempat.
4.	Peta Penetapan Kawasan Strategis	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Kandungan peta meliputi: 1) Delineasi kawasan strategis nasional (bila ada); 2) Delineasi kawasan strategis provinsi (bila ada); 3) Delineasi kawasan strategis kota; 4) Sungai, jaringan jalan arteri primer, kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3, dan lokal primer; dan 5) Nama-nama tempat.

Gambar 4. 1 Prosedur Penyusunan Kesesuaian Peta Wilayah Kota  
(Sumber: Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2009)

#### 4.7.2. Penyusunan peta kondisi eksisting dan hasil rencana sesuai dengan skala yang ditetapkan

##### a. Penjelasan secara ringkas perbedaan peta existing dan peta hasil rencana

Peta existing adalah peta yang memberikan kondisi informasi wilayah yang ada pada saat ini, sedangkan peta hasil rencana adalah peta yang menampilkan arahan pengembangan wilayah studi di masa depan. Sebagai contoh peta existing adalah Peta Administrasi, Peta Jenis Tanah, Peta Geologi, Peta kemiringan lereng, Peta Penggunaan Lahan dan lain-lain. Contoh peta rencana adalah Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2014, Peta Rencana BWK, Peta Rencana Hutan Kota, Peta Rencana Jaringan Jalan, dan lain-lain.

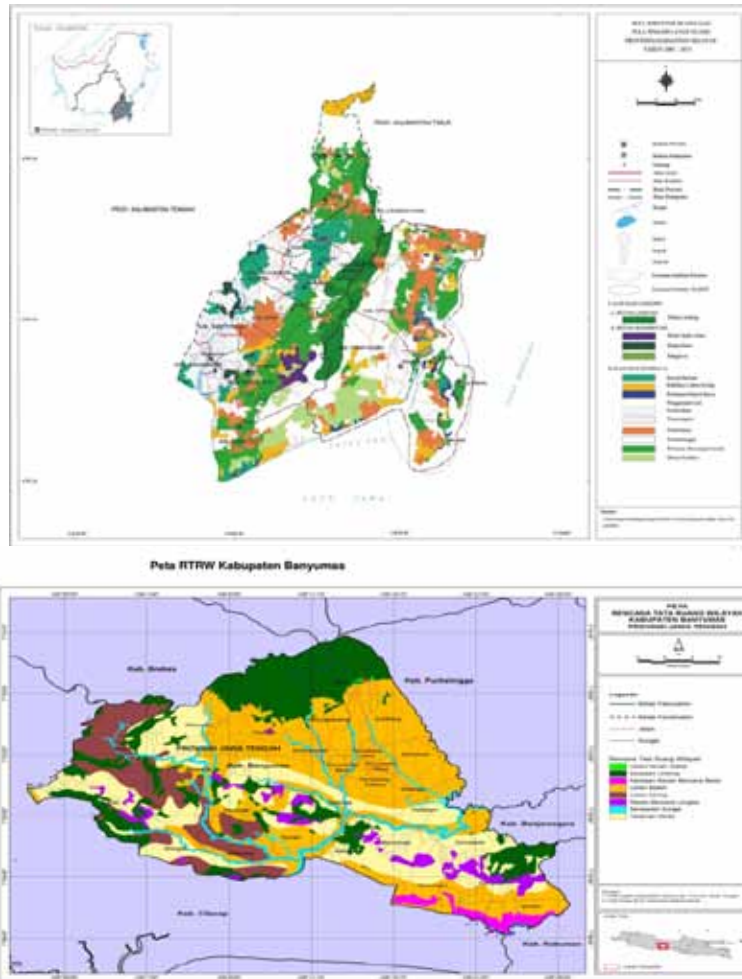


Gambar 4. 2 Gambar Peta Existing Jaringan Jalan Kota Tarakan



Gambar 4. 3 Gambar Peta Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Pemalang

- b. Identifikasi NSPK yang terkait dengan penyajian peta-peta  
Identifikasi NSPK yang terkait dengan penyajian album peta, yaitu :
- Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
  - Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
- c. Pembuatan peta-peta sesuai dengan format dan kerangka penyajian yang sudah ditetapkan  
Prosedur cara membuat peta-peta sesuai dengan format dan kerangka penyajian yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah, seperti yang telah dijelaskan pada poin 4.7.1 (c). Sebagai contoh berikut merupakan Peta RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dan Peta RTRW Kabupaten Banyumas dengan skala yang berbeda.



Gambar 4. 4 Peta RTRW Kabupaten Banyumas  
(Sumber:RTRW Kabupaten Banyumas)

d. Pembuatan peta-peta sesuai dengan skala yang ditetapkan secara cermat

Dalam membuat peta-peta yang sesuai skala yang ditetapkan pada poin sebelumnya, maka hal yang terpenting adalah melakukannya secara cermat.

#### 4.7.3. Penyusunan buku album peta disusun

a. Dapat menerangkan isi buku album peta yang disusun

Berikut daftar isi dan daftar peta yang diurutkan berdasarkan tahapan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten

##### 1. Peta Profil Tata Ruang Wilayah Kota

- Peta Orientasi
- Peta Batas Administrasi
- Peta Guna Lahan
- Peta Rawan Bencana
- Peta Sebaran Penduduk

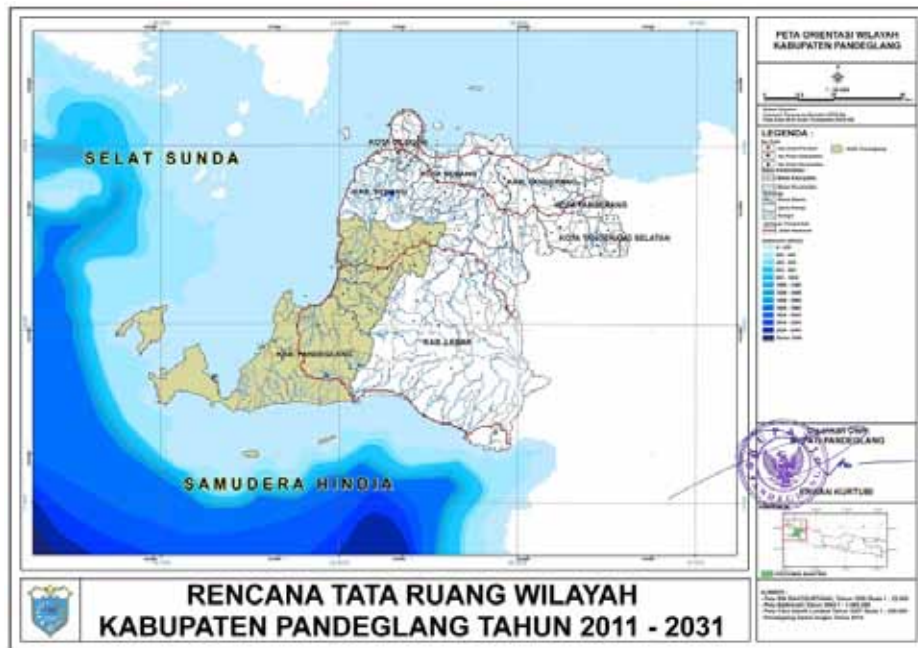


- Peta-peta profil tata ruang lainnya yang perlu ditampilkan dalam album peta
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- Peta Rencana Struktur Ruang
  - Peta Rencana Jaringan Prasarana
  - Peta Rencana Pola Ruang
  - Peta Penetapan Kawasan Strategis

b. Penyusunan album peta secara komprehensif, menarik dan mudah dimengerti

Berikut contoh penyusunan album peta RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 :

1. Peta Orientasi



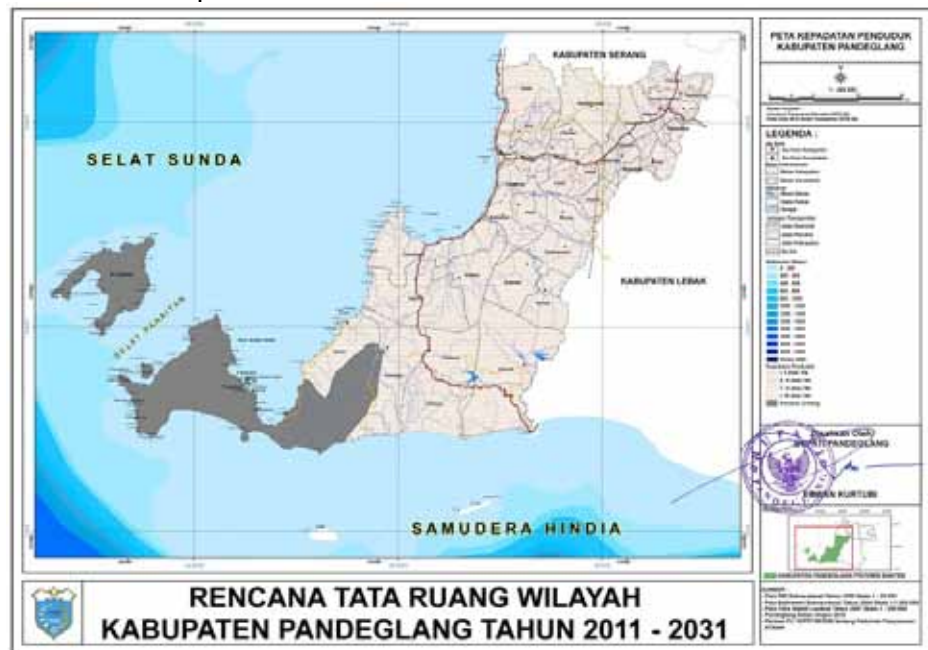
Gambar 4. 5 Peta Orientasi Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

## 2. Peta Batas Administrasi



Gambar 4. 6 Peta Administrasi Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

## 3. Peta Kepadatan Penduduk



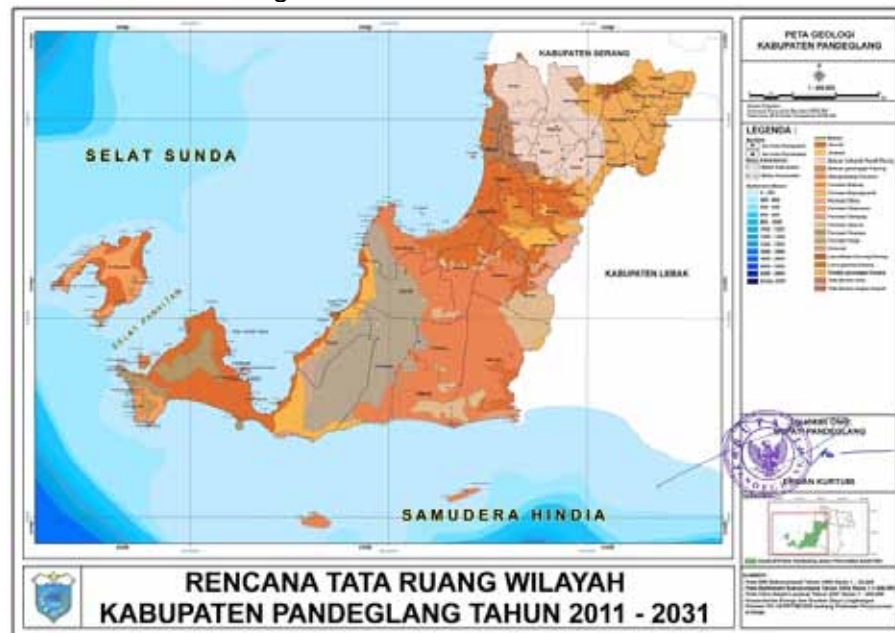
Gambar 4. 7 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pandeglang  
(Sumber:RTRW Kab. Pandeglang)

4. Peta Kondisi Fisik  
· Peta Jenis Tanah



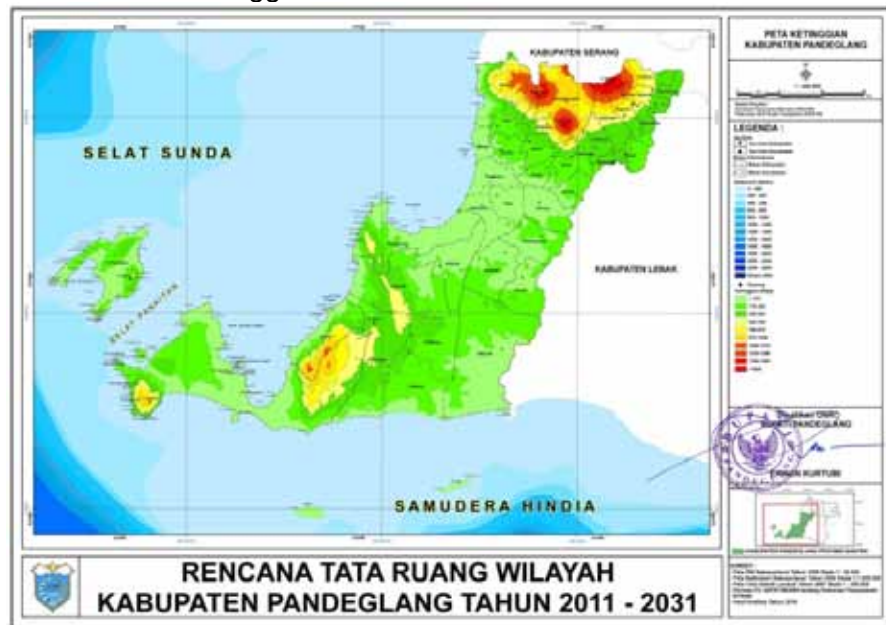
Gambar 4. 8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

· Peta Geologi



Gambar 4. 9 Peta Geologi Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

- Peta Ketinggian



Gambar 4. 10 Peta Ketinggian Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

- Peta Kelerengan



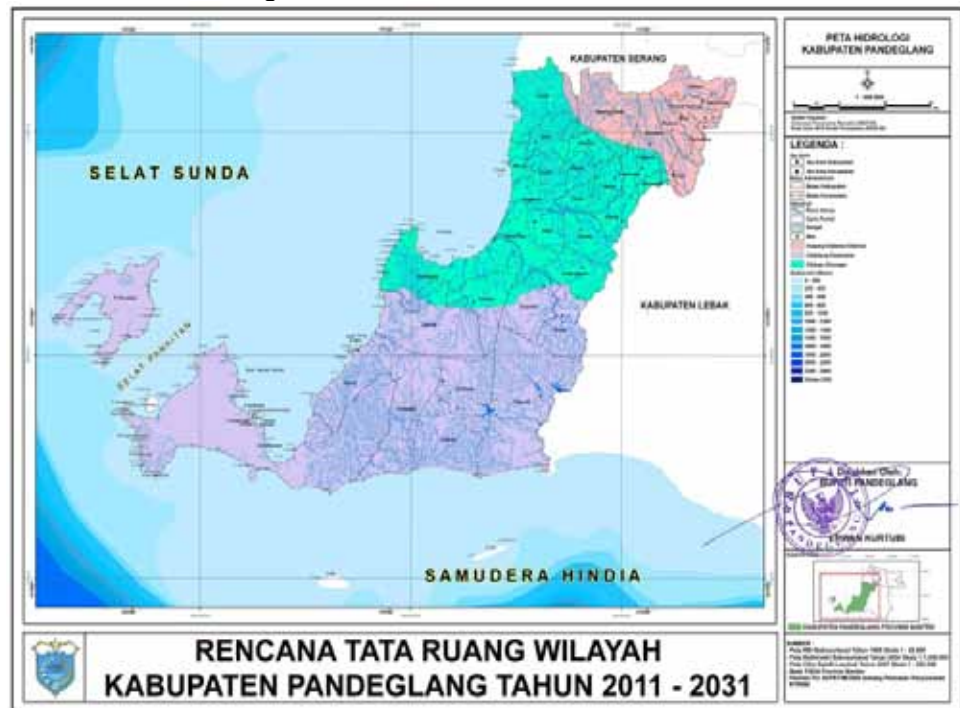
Gambar 4. 11 Peta Kelerengan Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

- Peta Hutan



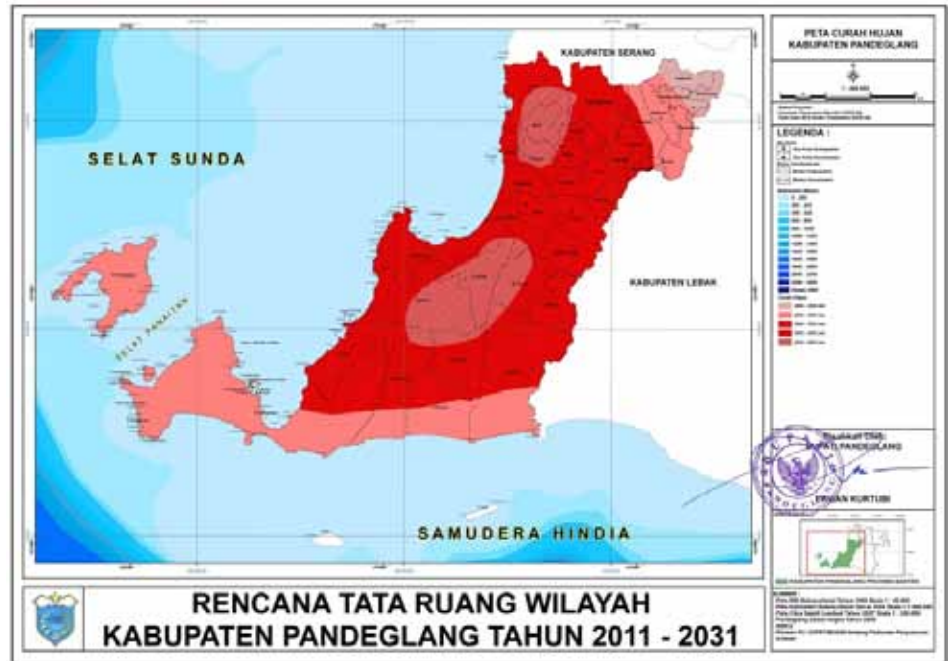
Gambar 4. 12 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

- Peta Hidrologi



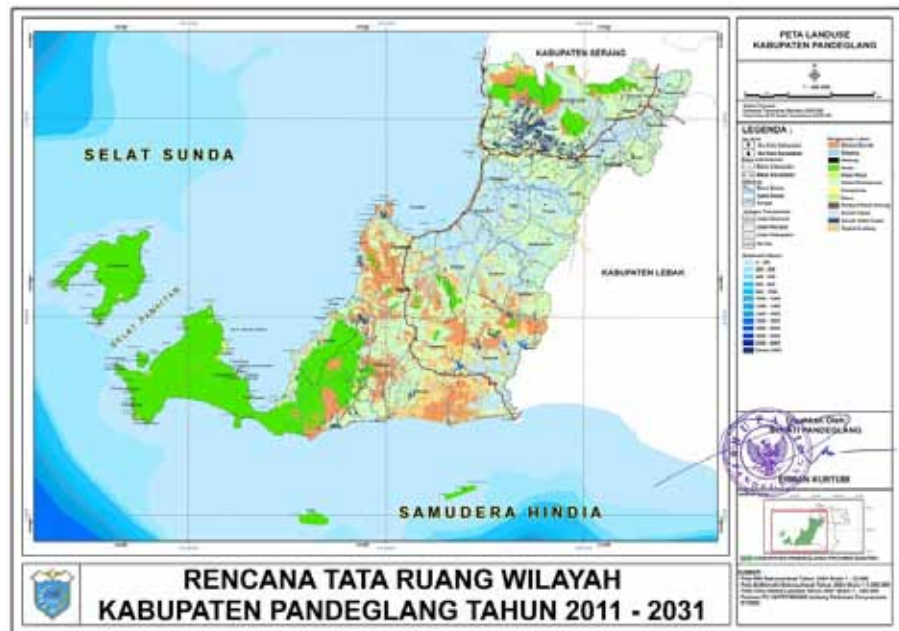
Gambar 4. 13 Peta Hidrologi Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

• Peta Curah Hujan



Gambar 4. 14 Peta Curah Hujan Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

5. Peta Guna Lahan



Gambar 4. 15 Peta Guna Lahan Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

6. Peta Rencana Pola Ruang  
· Peta Kawasan Lindung



Gambar 4. 16 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

· Peta Kawasan Budidaya



Gambar 4. 17 Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

### 7. Peta Arahan Zonasi Pesisir



Gambar 4. 18 Peta Arahan Zona Pesisir Kabupaten Pandeglang  
(Sumber: RTRW Kab. Pandeglang)

- c. Penjelasan susunan album peta beserta muatannya secara teliti  
Berikut susunan album peta beserta muatannya, berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota :



No	Nama Peta	Muatan Peta
<b>A. Peta Profil Tata Ruang Wilayah Kota</b>		
1.	Peta Orientasi	Peta skala kecil disesuaikan dengan ukuran kertas yang menunjukkan kedudukan geografis kota di dalam wilayah yang lebih luas.
2.	Peta Batas Administrasi	Delineasi kecamatan yang ada di dalam wilayah kota; a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Setiap kabupaten dan kota diberi warna berbeda; dan c. Setiap delineasi kecamatan diberi nama kecamatan bersangkutan. Setiap delineasi kecamatan diberi titik pusat kecamatan.
3.	Peta Guna Lahan	Berisi delineasi jenis guna lahan yang ada di seluruh wilayah kota; a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Klasifikasi pemanfaatan ruangnya bebas sesuai dengan apa yang ada di kenyataan (tidak harus mengikuti klasifikasi untuk Rencana Pola Ruang).
4.	Peta Rawan Bencana	Berisi delineasi kawasan-kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dalam gradasi warna.
5.	Penetapan Sebaran Penduduk	Berisi pola kepadatan penduduk per desa/kelurahan di seluruh kota untuk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Klasifikasi kepadatan penduduk disesuaikan dengan kondisi data, sekurangnya 3 interval dan sebanyak-banyaknya 5 interval; dan c. Gradasi kepadatan penduduk (interval) digambarkan dalam gradasi warna yang simultan.
6.	Peta-peta profil tata ruang lainnya yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam album peta.	
<b>B. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota</b>		
1.	Peta Rencana Struktur Ruang	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Kandungan peta meliputi: 1) Sistem pemukiman (PKW, PKL, PPK, dan PPL); 2) Sistem jaringan jalan (kolektor primer1, kolektor primer 2, kolektor primer 3, dan lokal primer) 3) Sistem jaringan kereta api (umum) 4) Bandar udara dan pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan 5) Nama-nama PKW, PKL, PPK, PPL, bandara dan pelabuhan, dan sebagainya.
2.	Peta Rencana Jaringan Prasarana	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Kandungan peta meliputi: 1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi; 2) Rencana sistem jaringan energi; 3) Rencana sistem jaringan sumberdaya air; 4) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Gambar 4. 19 Peta Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota

## BAB V

### SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

#### 5.1 Sumber Daya Manusia

##### 5.1.1 Instruktur

Instruktur dipilih karena dia telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk :

- 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar.
- 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru dan untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar.
- 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.
- 5) Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- 6) Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

##### 5.1.2 Penilai

Penilai melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan :

- 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta.
- 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan peserta.
- 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

##### 5.1.3 Teman kerja / sesama peserta pelatihan

Teman kerja /sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.

#### 5.2 Sumber-sumber Kepustakaan ( Buku Informasi )

##### 5.2.1 Sumber pustaka penunjang pelatihan

Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan ini.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :

- Buku referensi (text book)/ buku manual servis
- Lembar kerja
- Diagram-diagram, gambar
- Contoh tugas kerja
- Rekaman dalam bentuk kaset, video, film dan lain-lain.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip dalam pelatihan Berbasis Kompetensi mendorong kefleksibilitas dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengizinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada.

### 5.2.2 Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan:

Judul : Project, Planning and Control  
Pengarang : David G. Carmichael  
Penerbit : Taylor & Francis  
Tahun terbit : 2006

Judul : Project Management Planning and Control  
Pengarang : Albert Lester  
Penerbit : Elsevier Ltd  
Tahun terbit : 2007

Judul : Project Management: A Systems Approach to  
Planning, Scheduling, and Controlling  
Pengarang : Harold Kerzner, Phd  
Penerbit : Willey  
Tahun terbit : 2009

## 5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan

### 5.3.1 Peralatan yang digunakan:

- 1) Komputer/ *notebook*
- 2) *Projector*,
- 3) Papan tulis (*black board* dan *white board*);
- 4) *Clip board*
- 5) *Spidol whiteboard*

### 5.3.2 Bahan yang dibutuhkan:

- 1) Kerangka Acuan Kerja

- 2) Data analisa kebutuhan hasil identifikasi awal perencanaan;
- 3) Data hasil survey –primer dan sekunder- dengan jenis data spasial dan data non-spasial;
- 4) Peta geospasial dasar rupa bumi dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- 5) Data dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RTR KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait) meliputi data spasial dan data non-spasial;
- 6) Data dan peta profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya
- 7) Data dan peta mengenai daya dukung lingkungan dan perencanaan, konservasi dan bencana dan kewenangan dan pengelolaan lahan di wilayah perencanaan dengan jenis data spasial dan data non-spasial;
- 8) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda)
- 9) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;
- 10) Buku *text book* mengenai Tata Ruang Wilayah dan Kota;
- 11) Buku *text book* dan kajian mengenai data dan informasi di wilayah perencanaan.